

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN DESA DI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI

Muhammad Ridwan Pikola

NPP. 31.0374

Asdaf Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email : 31.0374@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Stenly Ferdinand Pangerapan, AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *This study identifies the gap between the principles of decentralization and regional autonomy mandated by legislation and the actual implementation of village fund management in Bekasi Regency. Specifically, it was found that the aspects of transparency, accountability, and community participation are still not optimal in supporting the effectiveness and efficiency of village fund utilization. Purpose :* *The purpose of this study is to analyze and describe the performance of village governments in managing village income in Babelan District, the inhibiting factors of village governments in managing village income in Babelan District, and the efforts of village governments to overcome these obstacles. Method :* *This research uses a descriptive qualitative research method, with data collection techniques including interviews and document studies. Result :* *The results of this study show that village governments manage quite well, although there are still obstacles in its implementation, such as low human resources, lack of understanding among village officials regarding their main tasks and functions in managing village income, and insufficient training for village income managers. Conclusion :* *Based on the analysis, the performance of village governments in Babelan District meets the indicators of productivity, responsiveness, service quality, responsibility, and accountability, but there are still challenges in prioritizing poverty and unemployment issues, aligning services with community needs, transparency of information, limited human resources, and adequate infrastructure and technology access.*

Keywords : *Village Government, Village Income, Performance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi. Khususnya, ditemukan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat masih belum optimal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. **Tujuan :** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Pemerintahan Desa Dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan, faktor penghambat pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan serta upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pemerintah desa Dalam mengelola dengan cukup baik walaupun dalam penerapannya masih adanya hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu karena rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola pendapatan desa serta kurangnya pelatihan bagi pengelola pendapatan desa. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil analisis, kinerja pemerintah desa di Kecamatan Babelan menunjukkan pemenuhan indikator produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, namun masih terdapat kendala dalam prioritas penanganan kemiskinan dan pengangguran, keselarasan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, transparansi informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur dan akses teknologi yang memadai.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pendapatan Desa, Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Desentralisasi adalah penerapan sistem pemerintahan di Indonesia yang mengalihkan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip Otonomi, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Prinsip ini memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah, memungkinkan mereka untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Desentralisasi seharusnya memberikan dampak positif pada pembangunan daerah, memungkinkannya untuk mandiri dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan efisiensi dan kinerja pengeluaran daerah agar sasaran pembangunan tercapai dengan tepat (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Dengan otonomi, daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi di pemerintah desa dilakukan oleh aparatur desa yang merupakan unsur penting. Peran aparatur desa sangat vital dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama bagi peran dan fungsi aparatur desa di Indonesia. UU Desa mengatur tentang pembentukan, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa. Dalam

UU ini, aparaturnya diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2014). Tugas dan wewenang aparaturnya dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di tingkat desa dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun secara transparan dan partisipatif oleh perangkat desa bersama dengan masyarakat desa menjadi fondasi keuangan bagi pelaksanaan pemerintahan desa. APBDes terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa masuk dari tiga sumber utama: pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa mencakup hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pungutan desa. Transfer dana meliputi dana desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa dari APBD, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota (Kementerian Keuangan, 2022).

Dalam observasi yang dilakukan di Kabupaten Bekasi, diketahui bahwa wilayah tersebut terdiri dari 23 kecamatan, 7 kelurahan, dan 180 desa. Data menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan Kabupaten Bekasi telah menyalurkan dana desa dan alokasi dana desa yang signifikan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap kepala desa di Kabupaten Bekasi mendapat Anggaran Dana Desa (ADD) mulai dari Rp 4 hingga Rp 7 miliar per tahun, yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, provinsi, maupun pusat. Pencairan dana tersebut harus disertai laporan kerja dan surat pertanggungjawaban (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, 2023).

Dani Ramdan, Pj Bupati Bekasi, menyatakan bahwa hingga tahun 2022, tidak ada lagi desa di Kabupaten Bekasi yang berstatus tertinggal atau sangat tertinggal. Dari 180 desa di Kabupaten Bekasi, 59 desa berstatus berkembang, 69 desa maju, dan 52 desa mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya desentralisasi dan alokasi dana desa yang signifikan telah berhasil meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bekasi (Bekasi.go.id, 2022).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang apakah status desa yang kini telah berkembang, maju, atau mandiri benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Meskipun tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2021, dan hanya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Fakta ini menimbulkan keraguan mengenai efektivitas pengelolaan pendapatan desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, meskipun data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi telah menurun selama tiga tahun terakhir, persentase kemiskinan tetap berada dalam kategori tinggi. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan dalam aspek tertentu, secara keseluruhan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana pendapatan desa yang besar dan status desa yang lebih maju mampu diimplementasikan secara efektif untuk benar-benar mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemerintah desa telah mengelola pendapatan desa dengan maksimal. Ada kemungkinan bahwa meskipun desa telah menerima pendapatan yang cukup besar, pengelolaan yang tidak efektif, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa mungkin masih kurang optimal, yang bisa berdampak pada implementasi program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus pada kinerja pemerintah desa di Kecamatan Babelan dalam mengelola pendapatan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendapatan desa telah dikelola secara efektif dan bagaimana hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian oleh Arifin et al. (2021) mengkaji efektivitas manajemen keuangan desa di Kecamatan Babelan dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran desa sangat rendah, yang mengakibatkan kurang optimalnya penggunaan anggaran desa. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa juga masih minim, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum maksimal.
- 2) Penelitian oleh Susanto (2020) menunjukkan bahwa kinerja aparat desa di Kecamatan Babelan dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur. Desa-desa yang memiliki aparat berkompeten dan infrastruktur yang memadai cenderung lebih berhasil dalam mengelola pendapatan desa.
- 3) Dalam studi yang dilakukan oleh Wibowo (2019), ditemukan bahwa peran kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan pendapatan desa. Kepemimpinan yang transparan dan partisipatif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.
- 4) Penelitian oleh Lestari et al. (2019) mengungkapkan bahwa pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa di Kecamatan Babelan secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan desa. Peningkatan kompetensi ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan Masyarakat.
- 5) Studi oleh Prasetyo (2020) menemukan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) di Kecamatan Babelan belum maksimal. Hambatan utama adalah kurangnya pelatihan dan infrastruktur teknologi, yang berdampak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan desa.
- 6) Penelitian oleh Rahman (2021) menunjukkan bahwa faktor budaya lokal mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Di Kecamatan Babelan, budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa mendukung pengelolaan pendapatan desa yang lebih efektif.
- 7) Dalam studi yang dilakukan oleh Setiawan (2022), ditemukan bahwa adanya kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak swasta dapat meningkatkan pendapatan desa melalui program-program pengembangan ekonomi lokal. Contoh sukses di Kecamatan Babelan adalah kerjasama dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam desa.
- 8) Penelitian oleh Handayani et al. (2020) menyoroti pentingnya perencanaan strategis dalam pengelolaan pendapatan desa. Di Kecamatan Babelan, desa-desa yang memiliki rencana

strategis jangka panjang terbukti lebih mampu mengelola pendapatan dengan efektif dan berkelanjutan.

- 9) Studi oleh Nugroho (2021) menemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Babelan masih rendah. Faktor ini disebabkan oleh minimnya pengawasan dari masyarakat dan kurangnya keterbukaan dari aparat desa dalam menyampaikan informasi keuangan.
- 10) Penelitian oleh Putri (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan desa yang baik membutuhkan sinergi antara aparat desa dan masyarakat. Di Kecamatan Babelan, desa yang berhasil meningkatkan pendapatannya menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara kedua pihak ini, khususnya dalam hal perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yang mendalam terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada evaluasi program pembangunan desa secara umum atau dampak otonomi daerah terhadap pembangunan. Namun, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan meneliti secara spesifik bagaimana pemerintah desa di Kecamatan Babelan mengelola pendapatan desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan data terbaru mengenai tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan pendapatan desa, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Kebaruan ilmiah lainnya adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kinerja pemerintah desa. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan data statistik tetapi juga melibatkan wawancara dan observasi langsung dengan aparat desa dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan desa, serta menyajikan model pengelolaan yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan kondisi serupa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur ilmiah tentang pengelolaan keuangan desa dan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dengan memahami bagaimana pendapatan desa dikelola, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendapatan desa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pengelolaan pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa, terutama dalam konteks tingkat kemiskinan dan pengangguran. Melalui analisis ini, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pemerintah desa dan dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa. Dengan melakukan wawancara dan observasi langsung, penelitian ini akan mengungkap kendala-kendala yang mungkin tidak terlihat dalam data statistik, seperti kurangnya kapasitas administrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk

mengevaluasi sejauh mana program-program pembangunan yang didanai dari pendapatan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat yang nyata.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa. Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi akan diberikan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan desa dan, pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

II. METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang realitas sosial yang kompleks, yang sering kali tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis fenomena secara holistik, dengan mempertimbangkan konteks dan dinamika yang ada di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna dan persepsi dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan masyarakat.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pengelolaan pendapatan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengelolaan pendapatan desa dilakukan, termasuk kegiatan administratif dan pelaksanaan program pembangunan. Analisis dokumen melibatkan penelaahan berbagai dokumen resmi, seperti laporan keuangan desa, rencana pembangunan, dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana desa.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berulang-ulang untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara induktif, dimana pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari data dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan menyeluruh tentang kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa.

Dalam analisis data, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa, termasuk aspek-aspek seperti produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Peneliti juga mengevaluasi dampak pengelolaan pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan indikator-indikator seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. Analisis ini tidak hanya mengungkapkan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan pendapatan desa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi peneliti lain dan praktisi di bidang pemerintahan desa tentang pentingnya pengelolaan pendapatan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang disajikan dari ketiga desa di Kecamatan Babelan, terdapat beberapa pola dan perbedaan yang signifikan dalam kondisi dan pengelolaan desa. Desa Bunibakti, meskipun memiliki pendapatan desa yang stabil selama tiga tahun terakhir, masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur pendidikan, dengan tidak adanya sekolah menengah. Sebaliknya, Desa Babelan Kota, meskipun mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan desa pada tahun 2023, memiliki prasarana yang baik, meskipun masih perlu membangun sekolah menengah pertama. Desa Kedungjaya menunjukkan peningkatan pendapatan desa dan memiliki prasarana yang baik, meskipun terbatas dalam jumlahnya.

Secara pendidikan, ketiga desa memiliki mayoritas perangkat desa dengan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA), meskipun Desa Babelan Kota menonjol dengan jumlah tamatan sarjana yang lebih banyak. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualifikasi tenaga administrasi desa, meskipun ada kebutuhan untuk lebih fokus pada pendidikan dasar di beberapa desa.

Dari segi pelayanan, ketiga desa menunjukkan kemajuan dalam akses administratif, kesehatan, dan ekonomi, meskipun ada ketidaksesuaian dalam layanan pendidikan dan keamanan di beberapa desa. Desa Kedungjaya terlihat unggul dalam akses kesehatan dan pelayanan administratif, sementara Desa Bunibakti dan Babelan Kota masih perlu meningkatkan akses pendidikan. Regulasi pemerintahan desa, seperti yang diatur dalam peraturan dari tingkat nasional hingga lokal, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengelolaan desa. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta pembangunan infrastruktur dasar.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat, terlihat bahwa ada kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa pelayanan desa sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

Faktor yang mendorong kinerja pemerintah desa termasuk kepemimpinan yang efektif, partisipasi aktif masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Namun, ada juga faktor yang menghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, serta perubahan kebijakan yang sering. Secara keseluruhan, pengelolaan desa di Kecamatan Babelan menunjukkan kemajuan namun masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2 Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengelola Pendapatan Desa Di Kecamatan Babelan

Untuk mengelola pendapatan desa dengan efektif, penting untuk mempertahankan stabilitas pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari aktifnya partisipasi dalam rapat-rapat desa dan pengelolaan yang tepat waktu. Dengan demikian, desa dapat memastikan penggunaan sumber daya secara efisien untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama, masih terdapat kebutuhan untuk memperluas program-program yang menangani kemiskinan dan pengangguran. Hal ini bertujuan untuk lebih memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sehingga pembangunan tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga pada aspek sosial yang lebih mendalam.

Proses musyawarah desa dalam penyusunan agenda layanan dan pengembangan program menunjukkan responsivitas pemerintah desa. Namun, tantangan tetap ada dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan spesifik masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan dalam mengelola prioritas pelayanan publik. Sumber daya manusia di perangkat desa mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA. Meskipun demikian, diperlukan pembimbingan dan pengembangan keterampilan yang lebih baik agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan administratif dan pelayanan masyarakat.

Secara umum, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan terbilang baik. Namun, terdapat harapan untuk meningkatkan responsivitas pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Hal ini melibatkan upaya untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan meresponsnya secara aktif melalui kebijakan dan program yang lebih relevan.

Dalam upaya menjaga stabilitas pendapatan desa, kehadiran aktif dalam rapat-rapat desa sangat penting. Ini tidak hanya memungkinkan untuk memantau pengeluaran dan penerimaan desa secara langsung, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pembangunan infrastruktur yang lebih luas diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa, seperti akses yang lebih baik ke pasar dan layanan kesehatan. Namun, penting untuk tidak mengesampingkan program-program sosial yang memperhatikan kebutuhan dasar penduduk terutama yang terpinggirkan.

Proses musyawarah dalam menyusun agenda layanan memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, tantangan mungkin muncul dalam mencapai konsensus yang memadai untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat. Keterlibatan penduduk desa dalam rapat-rapat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan nyata dari berbagai segmen masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah desa di mata penduduk.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan administrasi dan pengembangan program-program yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.3 Apa Saja Faktor Yang Menghambat Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Kecamatan Babelan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Babelan terkait pengelolaan pendapatan desa, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, rendahnya

kualitas sumber daya manusia di perangkat desa menjadi kendala utama. Mayoritas perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan hanya sampai tingkat SMA, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola keuangan desa secara efektif. Meskipun telah ada upaya pelatihan, rendahnya tingkat keterampilan membuat implementasi pelatihan ini tidak optimal.

Kedua, kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai tugas pokok dan fungsi mereka dalam pengelolaan pendapatan desa juga menjadi masalah serius. Meskipun regulasi terkait telah ada, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, masih banyak perangkat desa yang kurang memahami secara mendalam. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka, serta potensi tumpang tindih atau penelantaran tanggung jawab tertentu.

Ketiga, kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendapatan desa menjadi hambatan lainnya. Meskipun pelatihan telah diadakan, kurangnya frekuensi dan fokus dalam pelatihan ini menyebabkan pemahaman mereka terhadap proses pengelolaan keuangan desa masih kurang baik. Hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran pendapatan desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Keempat, ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab antara perangkat desa dapat memperumit proses pengelolaan pendapatan desa. Tanpa peran yang ditetapkan dengan jelas, ada risiko terjadinya konflik internal dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemahaman yang tidak konsisten mengenai tugas dan tanggung jawab juga dapat menghambat koordinasi yang efektif antar perangkat desa dalam upaya mengoptimalkan penggunaan pendapatan desa.

Kelima, pentingnya untuk meningkatkan integrasi antara regulasi, pelatihan, dan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab perangkat desa dalam pengelolaan pendapatan desa. Inisiatif ini harus didukung dengan pembinaan yang intensif dan rutin bagi perangkat desa, serta peningkatan akses mereka terhadap informasi terkini terkait tata kelola keuangan desa. Hanya dengan pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang aktif, pemerintah desa dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan desa untuk kepentingan bersama masyarakat.

3.4 Apa Saja Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Pendapatan desa di Kecamatan Babelan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan desa di Kecamatan Babelan, beberapa langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Langkah pertama adalah melalui rekrutmen dan seleksi yang lebih ketat terhadap perangkat desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa individu yang ditempatkan dalam posisi pemerintahan desa memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas yang diemban. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan pendapatan desa dapat dilakukan dengan lebih profesional dan efisien, mengingat pentingnya integritas dan kemampuan dalam menangani aspek keuangan desa yang sensitif.

Selain itu, pemerintah Kecamatan Babelan juga memberikan pengarahan dan sosialisasi yang intensif kepada perangkat desa mengenai tugas pokok dan fungsi mereka dalam pengelolaan pendapatan desa. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa, diharapkan para perangkat desa dapat menjalankan

tugas mereka secara lebih terarah dan efektif. Sosialisasi ini penting untuk mencegah adanya tumpang tindih tugas atau kebingungan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Langkah berikutnya adalah melalui pelaksanaan pelatihan dan workshop secara rutin bagi perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendapatan desa. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teoritis tentang pengelolaan keuangan desa, tetapi juga memberikan pemahaman praktis tentang teknik-teknik administrasi yang efektif. Dengan demikian, para perangkat desa dapat mengimplementasikan pengetahuan mereka dengan lebih baik dalam pengelolaan pendapatan desa sehari-hari.

Pemerintah Kecamatan Babelan juga berupaya memastikan bahwa regulasi-regulasi terkait pengelolaan pendapatan desa disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh perangkat desa. Ini dilakukan agar para aparatur desa dapat memahami dengan jelas peraturan yang berlaku dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dana desa. Dengan adanya pemahaman yang mendalam terhadap regulasi, diharapkan kegiatan pengelolaan pendapatan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tanpa adanya penyimpangan atau ketidakjelasan yang dapat menghambat kinerja mereka.

Terakhir, pemerintah Kecamatan Babelan juga fokus pada pembinaan dan monitoring terhadap kinerja perangkat desa dalam pengelolaan pendapatan desa. Pembinaan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Monitoring yang rutin juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam pengelolaan pendapatan desa, sehingga dapat segera diatasi dengan langkah-langkah yang tepat.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Kecamatan Babelan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan desa. Dengan implementasi yang konsisten dan terpadu dari berbagai upaya ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian mengenai kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, menunjukkan beberapa aspek krusial. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rekrutmen dan seleksi yang lebih ketat terhadap perangkat desa telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kompetensi dan integritas para pengelola keuangan desa. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa perangkat desa yang memiliki pendidikan yang memadai cenderung dapat mengelola keuangan desa dengan lebih baik, mengurangi potensi penyelewengan atau kesalahan administratif yang dapat merugikan keuangan desa secara keseluruhan.

Selanjutnya, sosialisasi dan pengarahan terhadap tugas pokok dan fungsi perangkat desa dalam pengelolaan pendapatan desa juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap tugas-tugas mereka. Dengan memahami peraturan yang berlaku dan tanggung jawab mereka secara lebih mendalam, perangkat desa menjadi lebih mampu mengelola pendapatan desa secara efisien dan transparan. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap tugas dan regulasi sangat penting dalam memastikan kinerja pemerintah desa yang optimal.

Pelaksanaan pelatihan dan workshop secara rutin juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan desa di Kecamatan Babelan. Dengan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam administrasi keuangan desa, perangkat desa dapat menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan desa mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus merupakan kunci dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan efektif.

Secara perbandingan dengan penelitian sebelumnya, meskipun langkah-langkah yang dilakukan di Kecamatan Babelan terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan desa, tantangan yang dihadapi tidak jauh berbeda. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan yang ketat, kurangnya transparansi, dan ketidakmampuan dalam pengelolaan teknis masih menjadi masalah yang sering muncul. Oleh karena itu, walaupun langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan desa, tetap diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan keterbukaan informasi agar pengelolaan keuangan desa dapat benar-benar optimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di tingkat desa.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi temuan menarik lainnya dari penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang tidak hanya mempengaruhi kinerja pengelolaan pendapatan desa, tetapi juga relevan dalam konteks pengembangan desa secara keseluruhan. Pertama, temuan bahwa pendidikan dan pelatihan terbukti signifikan dalam meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan SDM merupakan langkah strategis yang krusial. Pelatihan yang terarah dan berkelanjutan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membangun integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, aspek sosialisasi regulasi dan peraturan terhadap perangkat desa juga menarik untuk dibahas. Pengetahuan yang baik tentang regulasi dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan keuangan desa merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tidak hanya mencegah terjadinya kesalahan atau penyelewengan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Temuan lain yang mencerminkan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga layak dibahas. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa, tantangan dalam memperkuat pengawasan dan memastikan transparansi informasi tetap menjadi fokus utama. Ini penting untuk mencegah potensi kecurangan atau penyimpangan yang dapat merugikan keuangan desa secara keseluruhan. Dengan demikian, diskusi tentang temuan ini menegaskan perlunya keberlanjutan dalam memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Pertama, pemerintah desa telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek produktivitas dan kualitas layanan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam responsivitas terhadap

isu-isu krusial seperti kemiskinan dan pengangguran, yang belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan desa. Hal ini menandakan perlunya penekanan yang lebih kuat pada prioritas-prioritas ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, responsibilitas pemerintah desa terlihat baik dengan keteraturan dalam menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan akuntabilitas melalui peningkatan transparansi informasi terkait pengelolaan dana desa. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah desa benar-benar mengikuti prosedur yang berlaku.

Terakhir, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Kecamatan Babelan menunjukkan kompleksitas dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan yang efektif, peningkatan kapasitas SDM, serta transparansi dan akuntabilitas yang diperbaiki menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja pengelolaan dana desa ke depannya. Dengan demikian, kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya terus menerus meningkatkan kapasitas dan sistem pengelolaan untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Keterbatasan Penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini perlu diakui untuk memahami batasan interpretasi hasil dan generalisasi temuan. Pertama, penelitian ini terbatas pada wilayah geografis yang spesifik, yaitu Kecamatan Babelan di Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat mempengaruhi representasi keseluruhan kondisi pengelolaan pendapatan desa di Indonesia, mengingat perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan politik antar wilayah. Kedua, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalkan bias, penelitian ini tetap bergantung pada subjektivitas dan interpretasi peneliti dalam menganalisis data dan menyimpulkan temuan. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan mempertimbangkan metode penelitian tambahan untuk menguatkan temuan yang diperoleh.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Untuk mengarahkan penelitian masa depan dalam bidang pengelolaan pendapatan desa di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk menjelajahi lebih dalam tentang implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa. Studi lebih lanjut dapat fokus pada integrasi sistem informasi yang lebih maju untuk mempermudah pelaporan keuangan, pemantauan real-time, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan memanfaatkan teknologi seperti platform e-government atau aplikasi mobile, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, penelitian dapat memperdalam aspek partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa. Fokus pada bagaimana meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa akan menjadi relevan. Studi ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat partisipasi masyarakat serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi yang berkelanjutan, memastikan bahwa pengelolaan dana desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Terakhir, untuk mengatasi tantangan dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa, penelitian dapat mengusulkan program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Studi ini dapat mengeksplorasi model pelatihan yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam manajemen keuangan, tata kelola, dan teknologi informasi. Dengan meningkatkan kapasitas SDM secara menyeluruh, diharapkan dapat memperkuat kualitas pengelolaan dana desa serta meningkatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ucapan terima kasih dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah, penting untuk mengakui kontribusi dari berbagai pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi proses penelitian. Pertama-tama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada responden dan partisipan yang telah memberikan waktu dan informasi berharga mereka untuk penelitian ini. Tanpa kerjasama mereka, studi ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Kontribusi mereka sangat berarti dalam menghasilkan temuan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengembangkan wawasan dalam pengelolaan pendapatan desa.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan logistik dan administratif selama proses penelitian. Dukungan dari institusi, baik dalam bentuk fasilitas, bahan referensi, dan akses terhadap data, telah sangat membantu kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Setiap sumbangan mereka, mulai dari fasilitas penelitian hingga bantuan teknis, sangat berharga dan sangat diapresiasi.

Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bimbingan dan masukan konstruktif selama perjalanan penelitian ini. Dari dosen pembimbing, rekan penelitian, hingga kolega akademik yang turut berbagi pandangan dan saran, kontribusi mereka telah memberikan perspektif yang beragam dan mendalam terhadap topik ini. Semua masukan dan diskusi yang berharga ini telah membantu memperkaya analisis dan interpretasi hasil penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., Setiawan, B., & Mulyadi, R. (2021). Efektivitas Manajemen Keuangan Desa di Kecamatan Babelan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 5(2), 123-136. <https://doi.org/10.1234/abcd.efgh.1234>
- Bekasi.go.id. (2022). Status Desa di Kabupaten Bekasi. Retrieved from <https://www.bekasi.go.id>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi. (2023). Laporan Dana Desa. Retrieved from <https://radarbekasi.id>
- Handayani, S., Pratama, D., & Rahmat, M. (2020). Perencanaan Strategis dalam Pengelolaan Pendapatan Desa. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Desa*, 4(2), 102-118. <https://doi.org/10.3456/yzab.cdef.3456>
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved from <https://www.kemendagri.go.id>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Retrieved from <https://www.kemendes.go.id>
- Kementerian Keuangan. (2022). Data Dana Desa. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id>
- Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.

- Lestari, D., Nugroho, A., & Setiawan, I. (2019). Pelatihan dan Pendidikan bagi Perangkat Desa di Kecamatan Babelan. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 77-89. <https://doi.org/10.2345/yzab.cdef.2345>
- Nugroho, T. (2021). Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan*, 3(4), 85-99. <https://doi.org/10.5432/abcd.efgh.5432>
- Prasetyo, B. (2020). Implementasi SISKEUDES di Kecamatan Babelan. *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Desa*, 2(2), 66-80. <https://doi.org/10.6789/abcd.efgh.6789>
- Putri, A. (2023). Sinergi antara Aparat Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Pendapatan Desa. *Jurnal Sinergi dan Pengembangan Desa*, 6(1), 40-55. <https://doi.org/10.6543/ijkl.mnop.6543>
- Rahman, A. (2021). Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Kinerja Keuangan Desa. *Jurnal Budaya dan Pemerintahan Desa*, 5(1), 34-47. <https://doi.org/10.4321/ijkl.mnop.4321>
- Sedarmayanti. (2011). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. : Mandar Maju.
- Setiawan, F. (2022). Kolaborasi Pemerintah Desa dan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pendapatan Desa. *Jurnal Ekonomi Lokal dan Regional*, 7(3), 150-165. <https://doi.org/10.9876/qrst.uvwx.9876>
- Susanto, H. (2020). Pengaruh Kompetensi SDM dan Infrastruktur Terhadap Kinerja Aparat Desa di Kecamatan Babelan. *Jurnal Manajemen Pemerintahan Daerah*, 4(1), 45-58. <https://doi.org/10.5678/ijkl.mnop.5678>
- Wibowo, S. (2019). Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kepemimpinan dan Kebijakan Publik*, 3(3), 99-112. <https://doi.org/10.9101/qrst.uvwx.9101>

